

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)

Lola Septiana

Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: lolaseptiana01@gmail.com

Efrizal Syofyan

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: efrizal_syofyan@yahoo.com

Henri Agustin

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: : henri_feunp@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to determine: (1) the effect of the the Human Resources competencies toward the Local Government Finance Report quality, (2) the effect of the role of internal audits toward the Local Government Finance Report. Type of this research is causative. The population of the reseach were 27 units of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) in Sawahlunto. The technique of sample collection is total sampling method. The sources of the data of this research is the primary data. The technique of the the data collection is questionnaires. The data were analyzed using multiple regression analysis using SPSS version 20. The results of the reseach showed that: (1) Human resources competencies positively and significantly effect on the quality of LKPD, (2) the role of internal audit is does not a positively and significantly effect on the quality of LKPD. Suggestions of this are: to the next researchers should be able to use the model of other researches, such as, using an intervening variable, moderating variables, or control variables and replace other independent variables which may be affect the quality of financial statements and are expected to expand the area of researches.

Keywords: local government financial statements, human resources, internal audit.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dikatakan baik apabila telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Di dalam PP No. 71 tahun 2010 disebutkan bahwa karakteristik laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Wahyono (2004: 12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta Sumber Daya yang menghasilkannya. Informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator kualitasnya informasi. Mudah dipahami disini menyangkut Sumber Daya Manusia yang menghasilkannya. Sumber Daya Manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang

memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan Sumber Daya Manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (dapat dipahami).

Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Selain kompetensi Sumber Daya Manusia, salah satu faktor lain yang mempengaruhi keterandalan dan

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah peran audit internal. Peran audit internal berkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersirat dalam pasal 9 (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tersebut. Pengawasan intern yang dilakukan yaitu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) (PP No. 60 tahun 2008).

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 57 ayat 3 disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga bergantung kepada peran Inspektorat Kabupaten/Kota selaku audit internal pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas atau kehandalan Sistem Pengendalian Intern. Terdapat lima jenis opini yang diberikan BPK yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (*disclaimer of opinion*). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas, karena opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Opini yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Adanya perubahan peningkatan opini laporan keuangan suatu pemerintah daerah, misalnya dari WDP ke WTP secara umum telah menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintahan daerah tersebut dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Berdasarkan laporan BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015, masih banyak LKPD di Indonesia yang memperoleh opini WDP dibandingkan dengan WTP. Di Sumatera Barat pada IHPS I tahun 2015 masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WDP dari BPK, walaupun pemerintah Provinsi nya mendapatkan opini WTP. Secara umum permasalahan dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPD ini timbul karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang salah satu bagiannya yaitu kelemahan pada Struktur Pengendalian Intern.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian pada pemerintah daerah Kota Sawahlunto, karena berdasarkan data pada IHPS I Tahun 2015 dari tahun 2010-2014 opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto masih memperoleh opini WDP secara berturut-turut, ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan atau peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Kepala Perwakilan menyampaikan hasil pemeriksaan dari masing-masing pemerintah daerah, di Kota Sawahlunto menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pimpinan DPRD, Kepala Daerah, dan Inspektur Kabupaten/Kota, yaitu hasil pemeriksaan atas manajemen aset Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada

pemerintah Kota Sawahlunto masih menunjukkan beberapa kelemahan antara lain, terdapat aset yang dicatat sebagai BMD, namun belum didukung bukti kepemilikan, aset tetap dicatat ganda dan diantaranya dicatat dengan nilai perolehan yang berbeda (*diakses melalui Padang.bpk.go.id 14/02/2016*).

Berdasarkan “Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi SKPD DPPKAD Kota Sawahlunto” yang diakses melalui (*dppkad.sawahluntokota.go.id/file/sewareklam e.pdf* pada tanggal 11/11/2015) salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas staf. Terbatasnya staf DPPKAD yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, terbatasnya staf DPPKAD yang mengikuti diklat/pemagangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, dan terbatasnya staf DPPKAD yang menguasai teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi DPPKAD.

Selain permasalahan kualitas dan kuantitas staf permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan hasil temuan BPK dan koordinasi antar SKPD yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan diatas tidak lepas dari pentingnya SDM yang berkompeten dan peran audit internal terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto diharapkan dapat mengalami peningkatan opini BPK dari WDP menjadi WTP pada tahun berikutnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini diantaranya yaitu penelitian Sudiarianti (2015) yang melakukan penelitian pada SKPD Pemerintah Kabupaten Tabanam menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanam. Penelitian Roviyantie (2012) yang melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasik Malaya juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung bahwa peran audit internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah

penelitian Yuliani (2010) pada Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian Dian (2014) yang meneliti pada SKPD di Kota Pariaman juga menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)”.

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Sektor Publik khususnya mengenai pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya kepada pihak yang menyusun laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik. Sedangkan bagi akademisi, dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia, dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis

2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Didalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP No. 71 tahun 2010) :

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan. Kompetensi meliputi aspek *intent* (niat), *action* (tindakan), dan *outcome* (hasil) (Marwansyah, 2012).

Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang

memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005 dalam Celviana 2010).

2.3 Peran Audit Internal Pemerintah (Inspektorat)

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tersebut. Pengawasan intern yang dilakukan yaitu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) (PP No. 60 tahun 2008).

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Secara berkala, Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Laporan hasil pengawasan dapat berupa laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, atau laporan hasil pemantauan. Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah harus berkompeten, independen, dan objektif. Independen maksudnya adalah aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun (PP No. 60 tahun 2008).

Jadi, dapat disimpulkan peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

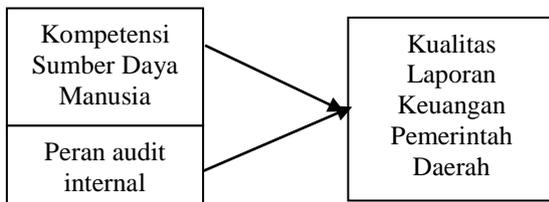
2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang juga membahas penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan peran internal audit terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh*). Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan peran internal audit secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5 Kerangka Konseptual

Untuk melihat keterkaitan antar variabel, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2a : Peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Sawahlunto yang berjumlah sebanyak 27 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf bagian keuangan pada SKPD. Jumlah responden sebanyak 54 orang dari 27 SKPD yang ada di Kota Sawahlunto, setiap SKPD terdiri dari 2 responden.

3.3 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara penyebaran kuesioner.

3.4 Jenis dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel independen terdiri dari kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) dan peran audit internal (X_2).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum kuisisioner dibagikan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan (*pilot test*), yang dilakukan pada 30 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah lulus mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Uji validitas dapat dilihat dari *corrected item-total colleration*, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka no. item tersebut dikatakan valid, dimana nilai r tabel untuk $n=30$ adalah 0,3061.

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009).

Menurut Sekaran (2003: 205), cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Kurang dari 0,6 tidak reliabel.
- 0,6 - 0,7 dapat diterima.
- 0,7 - 0,8 baik.
- Lebih dari 0,8 reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov Smirnov* dengan melihat signifikansi pada taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan jika nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal, jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

3.2 Uji Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Ghozali, 2009).

3.3 Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Dalam uji ini, apabila signifikansi lebih dari 5% berarti tidak mengandung heterokedastisitas.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rata-rata skor} = \frac{5(SS)+4(S)+3(KK)+2(JS)+1(TP)}{\text{jumlah responden}}$$

Dimana :

- SS = Sangat Sering
 S = Sering
 KK = Kadang-Kadang
 JS = Jarang Sekali
 TP = Tidak Pernah

Maka Tingkat Capaian Responden (TCR) dihitung dengan :

$$\text{TCR} = \frac{\text{Rata-rata Skor}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*nya.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini digunakan teknik analisis berganda. Persamaan analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

X_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 : Peran Audit Internal

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien Korelasi

e : error

3.5.3 Uji F (*F-test*)

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Setelah F-garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan F-tabel. Untuk menentukan nilai F-tabel, tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n - k)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep.

Jika F-hitung $>$ F-tabel, maka ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika F-hitung $<$ F-tabel, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

3.5.4 Uji T (*Hipotesis*)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:

1. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika $\text{sig} > \alpha$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak.

3.6 Definisi Operasional

3.6.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

3.6.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati, dan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan.

3.6.3 Peran Audit Internal

Peran audit internal adalah melakukan pengawasan intern, mereview, mengevaluasi, memantau, seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya. Audit internal berperan dalam memberikan nilai tambah terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Inspektorat selaku audit internal berperan dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan di masing-masing SKPD.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kota Sawahlunto, yang terdiri

dari dinas, kantor, badan, dan inspektorat daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari 2 responden. Dari 27 sampel tersebut, disebarkan sebanyak 54 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuisisioner berhasil diterima seluruhnya. Kuesioner diantar langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung.

4.2 Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pegujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendiskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (varaibel bebas)nya adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peran audit internal, dan variabel dependen (variabel terikat)nya adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut adalah tabel yang menyajikan deskripsi variabel penelitian secara statistik.

Tabel 1 disini

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka dapat dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 54$ adalah 0,2262.

Tabel 2 disini

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian tetap konsisten. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap tidak reliabel, keandalan kisaran 0,6-0,7 bisa diterima, keandalan kisaran 0,7-0,8 dikatakan baik, dan keandalan lebih dari 0,8 dikatakan reliabel.

Tabel 3 disini

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, yang

mana jika nilai $sig. > 0,05$ maka distribusi data dikatakan normal dan sebaliknya jika nilai $sig. < 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4 disini

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan nilai VIF untuk pengujian multikolinearitas antara sesama variabel bebas dapat dilihat pada

Tabel 5 disini

3. Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedasitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Dalam uji ini apabila hasil $sig > \alpha = 0,05$ atau 5%, maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedasitas pada model penelitian. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas. Adapun hasil pengujian heterokedasitas dapat dilihat pada

Tabel 6 disini

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada *output model summary* dari hasil analisis regresi berganda pada

Tabel 7 disini

Dari **tabel 7** dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* adalah 0,293. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran audit internal terhadap variabel terikat yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 29,3%, sedangkan 70,7% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

4.4.2 Model Estimasi Regresi

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 20. Secara rinci hasil pengujian regresi dapat dilihat pada

Tabel 8 disini

Dari **tabel 8** dapat dilihat hasil analisis model estimasi sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 23,348 + 0,533X_1 + 0,185X_2 + e$$

Dimana :

\hat{Y} = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = Peran Audit Internal

e = Standar error

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Nilai konstanta

Nilai konstanta sebesar 23,348 artinya adalah jika variabel independen yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran audit internal secara bersamaan nilainya 0, maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nilainya adalah sebesar 23,348.

b. Koefisien regresi (X_1)

Koefisien regresi variabel kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,533, artinya adalah setiap peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,533 dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefesien regresi (X_2)

Koefesien variabel peran audit internal sebesar 0,185, artinya adalah setiap peningkatan peran audit internal satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,185 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.4.3 Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah f_{ix} atau tidak. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} atau membandingkan antara nilai sig dengan $\alpha = 0,05$. Hasil pengolahan uji F dapat dilihat pada :

Tabel 9 disini

Dari hasil pengolahan data pada **tabel 9** didapat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $11,978 > 3,18$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran audit internal) secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

4.4.4 Uji Hipotesis (t -test)

Uji t statistik atau t -test bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis secara masing-masing atau parsial ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Nilai ttabel untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (db) = $n-k = 54-3 = 51 = 1,675$. Berdasarkan hasil analisis pada **tabel 8** diatas, maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Hipotesis diterima jika thitung $>$ ttabel atau nilai sig $<$ 0,05. Nilai ttabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,675. Untuk variabel kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) nilai thitung adalah 3,915 dan nilai sig adalah 0,000.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung $>$ ttabel yaitu $3,915 > 1,675$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah . Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini (H_1) diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Hipotesis diterima jika thitung $>$ ttabel atau nilai sig $<$ 0,05. Nilai ttabel pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,675. Untuk variabel peran audit internal (X_2) nilai thitung adalah 1,039 dan nilai sig adalah 0,303. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung $<$ ttabel yaitu $1,039 < 1,675$ atau nilai signifikansi $0,303 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa peran audit internal (X_2) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H_2) ditolak.

4.5 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini :

4.5.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan, semakin baik kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki SKPD, maka semakin baik pula kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya bukti bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini diharapkan kepada pemerintah daerah Kota Sawahlunto agar lebih dapat meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya pada pegawai di SKPD-SKPD yang bekerja pada bagian keuangan dan akuntansi. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan pemberian pelatihan-pelatihan, menempatkan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, dan pengadaan

fasilitas yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas sehingga bisa memperoleh opini WTP dari BPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Wahyono (2004), dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya. Informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator kualitasnya informasi. Menyangkut Sumber Daya Manusia yang menghasilkannya tentunya bagian penatausahaan keuangan SKPD sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan Sumber Daya Manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (dapat dipahami).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki SDM yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Kegagalan SDM akan berakibat buruk pada hasil penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang tidak baik.

Untuk itu, agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas hendaknya didukung oleh aparatur pemerintah yang memahami akuntansi pemerintah itu sendiri, orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus benar-benar memahami dan mengerti bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil

tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2012) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya yang memberikan hasil bahwa secara parsial kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Begitu juga dengan hasil penelitian Desy (2014), yang melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tabel distribusi frekuensi kompetensi Sumber Daya Manusia, nilai TCR terendah yaitu sebesar 79,63% yang berarti bahwa apabila ada masalah dalam pekerjaan penyusunan laporan keuangan, bagian penatausahaan SKPD belum mampu mengatasinya. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan SKPD Kota Sawahlunto perlu meningkatkan keterampilan yang dimiliki, dan TCR tertinggi yaitu sebesar 88,89% yang berarti bahwa penatausahaan keuangan SKPD Kota Sawahlunto memiliki sikap yang baik yang didukung oleh rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan.

Jika dilihat dari rata-rata tingkat capaian responden variabel kompetensi Sumber Daya Manusia berada pada kategori baik yaitu sebesar 83,85%, ini menandakan bahwa secara keseluruhan responden menjawab setuju bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Mengingat pentingnya kompetensi SDM, pemerintah kota Sawahlunto sebaiknya secara rutin mengadakan diklat penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan dengan keuangan mengingat staf

bagian keuangan dan akuntansi memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dan sebagian besar non ekonomi.

4.5.2 Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa aktif/tidaknya peran audit internal dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukannya penelitian. Meski diketahui bahwa nilai dari rata-rata TCR variabel peran audit internal ini di kategorikan baik, tetapi hipotesis kedua didalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan sebuah pernyataan mengenai pengertian audit internal yang diungkapkan *Institute of Internal Auditor* yaitu audit internal merupakan aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah terhadap organisasi dan meningkatkan operasi organisasi. Namun pada penelitian ini, tidak terbukti bahwa peran audit internal (inspektorat) memberikan nilai tambah kepada sebuah organisasi, karena hasil dari penelitian ini peran inspektorat selaku audit internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014) dan Yuliani (2010) yang meneliti pada pemerintah daerah Kota Pariaman dan Banda Aceh hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa peran audit internal memberikan pengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun TCR peran audit internal didalam penelitian ini sangat baik, namun pada pengujian hipotesisnya tidak terbukti bahwa peran audit internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mengingat pentingnya peran inspektorat dalam melakukan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah agar terciptanya laporan keuangan yang lebih berkualitas, hendaknya inspektorat harus lebih melakukan pengawasan kepada masalah yang menunjang

untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, selain itu sebaiknya inspektorat juga dapat bertindak sebagai *problem solver* bagi satker sehingga apabila satker mendapatkan masalah ataupun kendala dalam penyusunan laporan keuangan, inspektorat dapat membantunya dengan hasil akhir Kota Sawahlunto dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP yang berlaku.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Peran audit internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Adjusted R Square* dalam penelitian ini tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 29,3%.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada salah satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu pada SKPD yang ada di Kota Sawahlunto saja.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka penulis menyarankan :

1. Karena *adjusted R Square* dalam penelitian ini tergolong rendah, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memakai model penelitian lain, seperti menggunakan variabel *intervening*, variabel *moderating*, atau variabel kontrol. Dan mengganti variabel independen lain yang mungkin lebih mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, tidak hanya meneliti pada satu tempat saja.

Daftar Pustaka

- Ali, Biana. 2015. *Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem engendalian Intern sebagai Variable Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov NTB)*. SNA 18 Medan. Diakses melalui <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/SNA-18-087.pdf> [03/02/16].
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2015". Melalui <http://www.bpk.go.id/ihps> [17/11/15].
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Celviana. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraden)*. SNA XIII, Purwokerto. Diakses melalui asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/ASP_18.pdf [03/02/16].
- Desiana. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Vol. 2 No. 2. Diakses melalui <ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/2972/2463> [24/02/15].
- Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 24. Diakses melalui <jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal-ekonomi/article/.../62/58> [15/04/16].
- Diani, Irma Dian. 2014. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Infoemsi akuntansi Keuangan daerah, dan Peran Internal audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Pariaman)*. Jurnal FE UNP. Diakses melalui <ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/897/647> [14/12/15].
- Dppkad.sawahluntokota.go.id/file/sewareklam_e/.pdf [11/11/15].
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2016. *Auditing dan Asurans*. Jakarta: Grasindo.
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*. Jurnal FE UNP. Diakses melalui <ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/897/647> [14/12/15].
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A Tahun 2003 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil*. Melalui <http://www.goegle.com> [14/02/16].
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM TKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Padang.bpk.go.id. [14/02/16].

- Peraturan Menteri No. 23 tahun 2007 Pasal 2 tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Melalui <http://www.goegle.com> [19/01/16].
- No. 41 tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*. Melalui <http://www.goegle.com> [19/01/16].
- Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Melalui <http://www.goegle.com> [14/02/16].
- No. 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. . Melalui <http://www.goegle.com> [14/02/16].
- No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Melalui <http://www.goegle.com> [14/02/16].
- Riduwan. 2010. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Roviyantie. 2012. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Diakses melalui www.journal.unsil.ac.id/download.php?id=186 [24/12/15].
- Sawyer, Lowrence B. 2005. *Internal Auditing*. Terjemahan Desi Adhariani. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Lusi Novita. 2014. *Pengaruh Kapasitas SDM dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kerinci)*. Jurnal FE UNP. Diakses melalui ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1556/1179 [14/12/15].
- Sudiarianti. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SNA 18. Medan. Diakses melalui multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/SNA-18-117.pdf [03/02/16].
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi. Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga Yogyakarta: BPFE.
- Syarifuddin Akhmad. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen)*. Jurnal Fokus Bisnis Volume 14 . No. 2 Diakses melalui <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/22/19> [24/12/15].
- Tantriani Sukmaningrum. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Diakses melalui eprints.undip.ac.id/35305/ [19/11/15].
- Undang-Undang No. 17 tahun 2003. tentang *Keuangan Negara*. Melalui <http://www.google.com>. [11/11/15].
- No. 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Melalui <http://www.google.com>. [14/02/16].
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Yuliani. Syafrida. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh)*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 3 No. 2. Diakses melalui jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/340 [24/12/15]

LAMPIRAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Y	54	43	60	51,13	4,642
X1	54	31	50	41,93	4,330
X2	54	23	35	29,39	3,322
Valid N (listwise)	54				

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Sumber : Data olahan SPSS, 2016

Tabel 2. Uji Validitas

Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil

Instrumen Variabel	Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	0,275
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,432
Peran Audit Internal (X ₂)	0,593

Sumber : Data olahan SPSS, 2016

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach's Alpha

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	0,821
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,900
Peran Audit Internal (X ₂)	0,896

Sumber : Data olahan SPSS, 2016

**Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
The distribution of Unstandardized Residual is normal with mean 0,00 and standard deviation 3,83.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	,297	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05.

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	,826	1,210
X2	,826	1,210

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan SPSS, 2016

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,565 ^a	,320	,293	3,903

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 6. Uji Heterokedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,114	3,596		1,978	,053
1 X1	,000	,082	,000	,003	,997
X2	,140	,107	-,197	1,304	,198

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data olahan SPSS, 2016

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R²)

Adjusted R Square

Sumber : Data olahan SPSS, 2016

**Tabel 8. Model Estimasi Regresi
Koefisien Regresi Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23,348	5,941		3,930	,000
X1	,533	,136	,497	3,915	,000
X2	,185	,178	,132	1,039	,303

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data olahan SPSS, 2016

**Tabel 9. Uji F
Uji F**

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	365,012	2	182,506	11,978	,000 ^b
Residual	777,080	51	15,237		
Total	1142,093	53			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data olahan SPSS, 2016